

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara, semua provinsi, dan seluruh wilayah. Kemiskinan timbul akibat ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Sasmito & Nawangsari, 2019). Kemiskinan dapat menghalangi kemajuan suatu negara, yang berujung pada hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah yang harus ditangani oleh pemerintah, sehingga dengan cepat demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan, diawali dengan pelayanan kesehatan, pendidikan tanpa biaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan bahkan penyediaan kebutuhan pangan. Namun, sampai saat ini persoalan kemiskinan masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh, maupun adil bagi seluruh masyarakat Indonesia (Daud & Marini, 2019). Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi berupaya dengan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya dengan menerapkan kebijakan yang mendukung masyarakat kurang mampu yang direalisasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) (Najidah & Lestari, 2024).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program bantuan sosial ini terbukti efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sebagai suatu program bantuan sosial yang bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kesempatan bagi keluarga yang berada dalam kondisi miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak (Marantek & Sejati, 2023). Untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan dan pendidikan yang ada di sekitar mereka. Manfaat dari program Keluarga Harapan (PKH) juga mulai diarahkan untuk meliputi orang-orang penyandang disabilitas dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan sosial sejalan dengan bertambahnya usia. Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memperoleh akses dan harus sekaligus memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang berfungsi sebagai program tambahan secara berkelanjutan. Kelanjutan dari program ini akan berperan dalam mempercepat realisasi target tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Puspita et al., 2024). Program ini sangat menarik karena dilaksanakan secara luas, tidak hanya untuk para peserta atau penerima manfaat, tetapi juga didukung oleh tenaga pendamping lapangan yang sangat berdedikasi dan bekerja penuh waktu untuk membantu para RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) ini dalam aktivitas sehari-hari mereka (Septiana et al., 2024).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan pembangunan berkelanjutan yang menjamin hak asasi manusia dan menjaga kualitas lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik dari generasi ke generasi. SDGs (*Sustainable Development Goals*) bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan rasa lapar, melawan ketidaksetaraan, memastikan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada, serta menciptakan situasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. SDGs (*Sustainable Development Goals*) sangat berkaitan dengan aspek ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi fokus utama dalam memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat (Sayuti et al., 2022).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan suatu upaya untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh di tingkat lokal dan global. Dalam proses ini, manfaat SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dirasakan oleh semua masyarakat tanpa ada yang tertinggal atau terabaikan. SDGs (*Sustainable Development Goals*) ini bertujuan untuk meningkatkan seluruh potensi yang ada baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat (Handrian & Andry, 2020). Kesejahteraan mengacu pada kondisi di mana individu berada dalam keadaan yang aman, makmur, nyaman, terlindung dari berbagai macam

gangguan kendala atau kesulitan dan lain-lain (Sitorus et al., 2020). Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam merancang pembangunan dan evaluasi peningkatan kualitas hidup masyarakat (Andaniyati N, Destiningsih R, 2021).

Berdasarkan data penduduk miskin Kecamatan Depok tahun 2011-2024, pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Berikut ini disajikan data presentase penduduk kemiskinan Kecamatan Depok tahun 2011-2024:



Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2011 - 2024
(Sumber: Badan Statistik Kabupaten Cirebon)

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik di Kabupaten Cirebon yang dipebarui tanggal 11 Februari 2025 menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 11,00% pada tahun 2024. Hal ini menunjukan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil yang memiliki dinamika ekonomi yang positif. Dalam hal ini faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan pada Kecamatan Depok dipengaruhi oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Melalui bantuan bersyarat (misalnya seperti anak sekolah harus bersekolah, ibu hamil wajib memeriksa kehamilan) membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kemiskinan Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Penduduk Miskin (Orang)
Cikeduk	3143
Warugede	3071
Karangwangi	5329
Getasan	2744
Kejuden	3232
Keduanan	3227
Waruroyom	2349
Warukawung	460
Warujaya	154
Depok	1235
Kasugengan Kidul	712
Kasugengan Lor	160
Total	25.816

(Sumber : Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Tahun 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah penduduk yang tergolong miskin di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 tercatat sebanyak 25.816 orang. Desa Karangwangi merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu 5.329 orang. Selanjutnya disusul oleh Desa Kejuden sebanyak 3.232 orang, Desa Keduanan sebanyak 3.227 orang, Desa Cikeduk sebanyak 3.143 orang, dan Desa Warugede sebanyak 3.071 orang. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin paling sedikit terdapat di Desa Wanjaya dengan 154 orang, kemudian Desa Kasugengan Lor sebanyak 160 orang, serta Desa Warukawung sebanyak 460 orang.

Tabel 1. 2 Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
1	2	3	4
0-4	2.956	2.772	5.728
05-09	3.175	2.979	6.154
10-14	3.075	2.868	5.943
15-19	2.127	2.149	4.276
20-24	2.927	2.809	5.736
25-29	2.824	2.835	5.659
30-34	3.038	2.891	5.929
35-39	2.971	2.905	5.876
40-44	3.190	2.997	6.187

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
45-49	2.663	2.522	5.185
50-54	2.251	2.101	4.352
55-59	1.574	1.665	3.239
60-64	1.243	1.216	2.459
65-69	815	845	1.660
70-74	507	559	1.066
75+	450	645	1.095
Kecamatan Depok	35.786	34.758	70.544

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon
Maret 2023 dan Maret 2024)

Pendampingan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program serta memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan dengan tepat dan efektif (Sukasari et al., 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di Kecamatan Depok pada tahun 2012. Sekitar 3.152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 12 desa yang ada di Kecamatan Depok telah menerima bantuan yang diberikan melalui program ini.

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Bantuan

Nama Desa	Jumlah Penerima Bantuan PKH (orang)
Cikeduk	287
Warujaya	200
Warukawung	218
Warugede	208
Keduanan	199
Waruroyom	253
Getasan	276
Kasugengan Kidul	306
Kasugengan Lor	310
Kejuden	224
Depok	263
Karangwangi	408
Jumlah	3.152

(Sumber data: Indah Runiati S.Pd.I., Koordinator Kesehatan Kecamatan Depok)

Pada tabel 1.3 terlihat bahwa desa Kasugengan Kidul merupakan salah satu desa dengan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa terbilang cukup tinggi yaitu 306 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kasugengan Kidul merupakan salah satu desa di Kecamatan Depok dengan jumlah penduduk mencapai 7.170 jiwa, dengan rincian laki-laki 3.616 jiwa dan

Perempuan 3.554 jiwa. Masyarakat dengan mata pencaharian rata-rata pedagang dan buruh pabrik.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Depok, khususnya di Desa Kasugengan Kidul, menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya adalah pemanfaatan bantuan yang belum optimal oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran dana bantuan dianggap belum mencukupi kebutuhan penerima manfaat, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga. Temuan yang dilakukan oleh Muin & Rosdiana (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima bantuan. Tetapi berdasarkan indikator perubahan nyata yang dialami masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baiq Dewi Kamariani et al. (2024) menemukan efektivitas program keluarga harapan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Suryawangi telah dinyatakan baik dan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Indikator efektivitasnya adalah pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, mencapai tujuan dan perubahan nyata yang telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Sumbawati et al. (2020) menegaskan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang diukur melalui empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, pemahaman tujuan program, sosialisasi, dan monitoring program di Desa Ropang sudah cukup efektif dengan skor sebesar 78,80%.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Susetyo (2022) menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur pada tahun 2021 telah berjalan secara efektif namun belum optimal karena masih terdapat indikator yang belum terpenuhi. Hambatan dalam penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Kayu Putih meliputi keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam menjadwalkan pertemuan kelompok bulanan, dan keterlambatan peserta PKH dalam menyerahkan dokumen. Hal serupa juga dikemukakan oleh Guanti & Firmania (2025) menunjukkan bahwa Program

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sepadu telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui perbaikan kondisi tempat tinggal, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pola konsumsi. Keberhasilan program ini didukung oleh peran aktif pendamping sosial yang menjalankan fungsi edukatif dan pengawasan sesuai amanat regulasi.

Temuan ini sejalan dengan Azhary (2025) menunjukkan bahwa indikator sosialisasi program berjalan secara efektif, sedangkan ketepatan sasaran, pencapaian tujuan program, dan pemantauan dinilai kurang efektif. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah ketergantungan penerima terhadap bantuan, serta masalah sistem dan administrasi.

Selain itu, ditemukan pula masalah ketergantungan yang signifikan terhadap bantuan sosial, tercermin dari rendahnya tingkat kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa motivasi dan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mandiri dan keluar dari garis kemiskinan masih sangat lemah. Pemberdayaan keluarga miskin atau penerima bantuan sosial merupakan aspek krusial dalam pengembangan komunitas. Menurut Nadilla et al (2022), pemberdayaan keluarga tidak hanya mengandalkan bantuan sosial pemerintah, tetapi juga mengharuskan pemanfaatan dan optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki, termasuk pengetahuan, potensi, dan keterampilan, agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menjadi mandiri dan berkembang.

Menurut penelitian Karlina et al (2022) mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Muara Bagonan, Kabupaten Murung Jaya, menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memang menciptakan perubahan positif yaitu memberikan harapan hidup lebih baik dan kemudahan bersekolah tanpa kekhawatiran masalah ekonomi. Namun, hasil studi tersebut juga menegaskan bahwa strategi pemberdayaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum memenuhi standar ideal karena beberapa aspek penting, seperti pengembangan kelembagaan kelompok, penyediaan informasi tepat guna, dan pengembangan usaha produktif, belum terealisasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah & Kunarti (2019) menjelaskan bahwa pemberdayaan dilakukan oleh fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pertemuan rutin bulanan dalam bentuk penyampaian materi pemberdayaan. Meskipun bantuan material yang diterima tidak banyak, intervensi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Prathama (2024) mengemukakan bahwa peran memfasilitasi, mendidik, representasi, dan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan efektif.

Penelitian ini juga sejalan dengan Muin & Lubis (2020) kehadiran dan peran Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidiangkat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat yang sangat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang miskin.

Penelitian yang dikemukakan oleh Putri (2016) bahwa kegiatan pemberdayaan melalui *Family Development Session* (FDS) di Desa Manduro Manggunggajah menunjukkan hasil yang baik meskipun belum optimal. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, pendamping berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang menarik melalui inovasi materi dan sarana, sehingga peserta lebih antusias mengikuti program. Pada tahap transformasi kemampuan, terlihat perubahan signifikan pada perilaku dan pola pikir Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Temuan ini sejalan Afif et al (2024) menunjukkan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Adiluwih telah melaksanakan tugasnya secara efektif. Pendamping berhasil menjalankan program pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui beberapa kegiatan, yaitu: program pengembangan minat belajar melalui Bimbingan Belajar, Program Pemanfaatan Lahan Terbatas, serta Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah belum semua penerima manfaat mampu mandiri secara ekonomi maupun mengalami

peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan masyarakat dan efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat, menilai bantuan yang diberikan disalurkan dengan tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Secara teoritis penelitian dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan, dan memberikan kontribusi terhadap literatur akademik yang berfokus pada pencapaian SGD's (*Sustainable Development Goals*) di tingkat lokal. Secara praktis dapat memberikan gambaran dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan bantuan yang terukur.

Lebih lanjut penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pemberdayaan dan efektivitas dapat mempengaruhi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang di mana pada penelitian sebelumnya hanya membahas salah satu variabel saja pada setiap penelitiannya. Dalam hal ini penulis tertarik mengangkat tema yang lebih spesifik lagi, yaitu **“Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Depok”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih ketergantungan pada bantuan sosial terutama Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Dana bantuan dianggap belum mencukupi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Depok?
2. Apakah efektivitas program keluarga harapan (PKH) berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Depok?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Depok.
- b. Untuk menganalisis pengaruh efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Depok.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan (SDGs). Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain yang berminat untuk mengeksplorasi kontribusi pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Kecamatan Depok

Memberikan gambaran nyata tentang seberapa efektif penerapan strategi pemberdayaan masyarakat dan efektivitas program keluarga harapan (PKH) di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai bahan penilaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki cara pelaksanaan program.

2) Pendamping PKH

Menjadi acuan untuk meningkatkan pendekatan pendampingan, terutama dalam hal memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat lebih mandiri dan berdaya.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan yang lebih efektif, serta mendukung pencapaian tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan (SDGs 1) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4) Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Mendorong pemahaman bahwa pemberdayaan tidak sebatas dukungan keuangan, tetapi juga mencakup peningkatan kemampuan, akses informasi, dan kemandirian ekonomi.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini mampu memberikan gambaran keadaan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga dapat menjadi acuan dalam merancang program pemberdayaan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami uraian penelitian secara sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai fokus dan arah penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran menguraikan teori dasar yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, program keluarga harapan (PKH), kesejahteraan sosial, dan pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu, bab ini juga menyajikan penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka pemikiran dalam penelitian, serta hipotesis yang diajukan sebagai dugaan awal mengenai masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan tentang metode penelitian memaparkan jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi dan waktu penelitian, populasi serta sampel, sumber data, metode pengumpulan data, variabel

penelitian disertai dengan definisi operasionalnya, serta cara analisis data yang diterapkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan menyajikan gambaran umum tentang Lokasi penelitian, deskripsi data yang diperoleh, hasil analisis yang dilakukan serta pembahasan dari hasil penelitian yang terhubung dengan teori yang ada dan penelitian sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh terhadap temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada mencakup jawaban atas pertanyaan yang diuraikan dalam rumusan masalah yang kemudian telah dianalisis pada bab sebelumnya. Saran pada bab ini yaitu berisi mengenai rekomendasi penulis tentang topik terkait berdasarkan Kesimpulan yang diperoleh.

